

**EFEKTIVITAS BADAN PENGHUBUNG DALAM
MEMFASILITASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMBANGUNAN KEPADA PEMERINTAH PUSAT**
*THE EFFECTIVENESS OF LINKING AGENCY IN FACILITATING LOCAL
GOVERNMENT AND DEVELOPMENT AFFAIRS TO THE CENTRAL
GOVERNMENT*

¹Ruhut Novum S.R Simanullang, ²Rayhan Ahmad Adimulyo, ³Satrio Panji Wisesa,
⁴Sulistia Wardani, ⁵Muhammad Faisal

^{1,2,3,4} Nindya Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan

⁵Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan

Email Korespondensi: ruhutnov@gmail.com

ABSTRAK

Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat, adalah badan Daerah yang satu-satunya terletak di Ibu Kota Negara, setelah terbentuknya Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat sebagai fasilitator kebutuhan daerah dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat maka peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat dalam memfasilitasi urusan Pemerintah Jawa Barat ke Pemerintah Pusat dalam membantu memajukan pembangunan Daerah Jawa Barat penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan 1) Karakteristik Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat terdiri dari Kepala Badan yang dipimpin oleh Eselon III, Subbidang tata usaha, Subbidang Hubungan Antar Lembaga, Subbidang Promosi dan Informasi, dan Subbidang Keprotokolan, yang seluruhnya dipimpin oleh Eselon IV. 2) Karakteristik Lingkungan Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat berada dalam lingkup pemerintahan kota yang sangat dekat dengan pemerintahan pusat. 3) Karakteristik Pekerja sebagian besar pegawai berasal dari daerah Jawa Barat yang memiliki nilai adat dan budaya yang sama. 4) Kebijakan dan Praktek Manajemen dalam Renstra 2017- 2022 tertuang yang menjadi kebijakan pemerintah daerah dalam memyusun usaha- usaha untuk membangun daerah Jawa Barat berpointkan pada terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas, terwujudnya tata budaya adat istiadat dan seni ke- Jawa Baratan yang Islami, terwujudnya informasi dan data yang terintegritas.

Kata Kunci: Efektivitas, Urusan Pemerintah Daerah Dengan Pusat

ABSTRACT

Jawa Barat Government Liaison Agency, is a Regional agency which is only located in the Capital City, after the establishment of the Jawa Barat Government Liaison Agency as a facilitator of regional needs in collaborating with the central government, researchers want to know how the effectiveness of the Jawa Barat Government Liaison Agency in facilitating Jawa Barat Government affairs to The Central Government in helping to advance the development of the Jawa Barat Region, this research was conducted using a qualitative descriptive method, the results of the study showed 1)Organizational characteristics of the Jawa Barat Government Liaison Agency consistingof the Head of the Agency led by Echelon III, the Administration Sub-Sector, the Inter-Relations Sub-Sector, the Promotion and Information Sub-Sector, the Protocol Sub-secto, which are entirely led by Echelon IV. 2)Environmental

Characteristics The Jawa Barat Government Liaison Agency is within the scope of city administration which is very close to the central government. 3) Characteristics of workers, most of the employees come from the Jawa Barat region who have the same customary and cultural values. 4) Management Policies and Practices in the 2017-2022 Strategic Plan are stated as local government policies in formulating efforts to develop Jawa Barat areas which point to the realization of reforms. quality bureaucracy, the realization of an Islamic cultural system, customs and arts, the realization of integrated information and data.

Keywords: *Effectiveness, Relations between Local and Central Government*

PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Barat berada di bagian barat Pulau Jawa. Wilayahnya berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Laut Jawa di sebelah utara, Laut Jawa dan Provinsi Jawa Tengah di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, serta Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta di sebelah barat yang menjadikan Provinsi Jawa Barat berdasarkan kondisi geografisnya menjadi salah satu Provinsi penunjang Ibukota Negara serta potensi alam dan segelintir potensi sumberdaya manusia yang paling menjanjikan ditandai dengan pengelolaan sumberdaya alam berdasarkan sumberdaya manusia mutakhir, namun hal itu tidak serta merta membuat Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Karna pada kenyataannya masih banyak kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Maka dari itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk Badan Penghubung yang terletak di Ibu Kota Negara sebagai pihak yang berkoordinasi mengenai permasalahan pemerintahan daerah ke pemerintahan pusat. Badan Penghubung merupakan perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang penghubung pemerintahan, meliputi hubungan antar

lembaga, promosi dan informasi serta keprotokolan untuk Jawa Barat.

Pembentukan badan penghubung tersebut berdasar hukum pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 tentang tentang perangkat daerah yang merupakan instruksi menteri dalam negeri, dengan tujuan untuk membuka belunggu yang menutup potensi daerah agar mendapatkan investornya, dan menjadi aliran ekonomi pendapatan daerah. Dalam PP No.18 Tahun 2016 tersebut berbunyi ”untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan dengan pemerintah pusat, daerah provinsi dapat membentuk badan penghubung daerah provinsi di Ibu Kota Negara”.

Pembentukan perangkat daerah tersebut dibentuk berdasarkan asas sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
2. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah
3. Efisiensi
4. Efektivitas
5. Pembagian habis tugas
6. Rentang kendali
7. Fleksibilitas

Pembentukan badan penghubung juga didasarkan pada luas daerah, jumlah penduduk, potensi dan sumber daya alam yang dimiliki. Secara karakteristik

tersebut Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 35.378 Km², terdiri dari 18 Kabupaten, 9 Kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, 5.957 desa, dengan jumlah penduduk 49,94 juta jiwa yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia yang jika dilihat secara potensi alam didominasi pada hasil alam berupa perkebunan dan pertanian dan dari sektor potensi sumber daya manusianya didominasi oleh sektor industri dan investasi. Untuk sektor perkebunan dan pertanian berada di beberapa kawasan seperti di sepanjang Pantura, Priangan Timur, Indramayu, Kawarang, dan Subang, adapun komoditas pertanian dan perkebunan utama di Jawa Barat antara lain padi, bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, kelapa sawit, teh, cengkeh, tembakau dan tebu. Industri dan investasi di provinsi Jawa Barat merupakan salah satu rancangan strategis pemerintah pusat dan merupakan pusat industri manufaktur dan perdagangan no-1 di Indonesia bahkan menjadi pusat industri terbesar se-Asia Tenggara yaitu Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang yang di dalamnya terdapat berbagai komoditas mulai dari rumah tangga hingga otomotif. Bahkan sektor industri, investasi, manufaktur, dan perdagangan merupakan penyumbang pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Jawa Barat dan bahkan salah satunya di Indonesia.

Dengan segala potensi yang dimiliki tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap setelah dibentuknya badan penghubung pemerintah daerah yang berpusat di ibukota negara dapat membuka pandangan pemerintah pusat dan dunia internasional untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya tersebut bersama-sama yang tentu tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah.

Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tugas sebagai fasilitator untuk menjalankan pelayanan serta memfasilitasi hubungan kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi lainnya, memfasilitasi hubungan kerja dengan Perwakilan Negara Asing di Jakarta, memfasilitasi Hubungan Lembaga Swasta Nasional dan Internasional yang memiliki perwakilan di Jakarta, pelaksana fasilitasi kunjungan kerja Gubernur dan pejabat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pelaksana fasilitas promosi potensi, sumber daya alam dan budaya, dan koordinasi dengan instansi terkait pengelolaan keuangan Provinsi Jawa Barat. Dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Badan penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut memiliki peran dalam memfasilitasi segala urusan administrasi yang sifatnya non teknis, hanya bertugas dalam memfasilitasi segala kebutuhan Pemerintah Daerah ketika melakukan kunjungan kerja.

Oleh sebab itu bagaimana efektivitas Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memfasilitasi urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Pemerintah Pusat dalam membantu pembangunan di daerah, yang dijelaskan oleh Hidayat (1986: 30): "Efektivitas merupakan sejauh mana persentase input yang dilihat dari (Kualitas, Kuantitas, dan Waktu) dapat dicapai".

Pendapat tersebut didukung pula oleh Siagian (2001: 24) yang menjelaskan: "Efektivitas adalah pemanfaatan segala fasilitas baik sumber daya maupun hal-hal lain yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk melakukan program yang direncanakan agar terwujudnya keberhasilan, dan efektivitas ditunjukkan

dengan terwujudnya keberhasilan dari sasaran tersebut”.

Untuk menguraikan efektivitas dari Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat, peneliti menggunakan teori efektivitas organisasi oleh Steers (2005) dalam *Efektivitas Organisasi*, yang mengolongkan faktor-faktor efektivitas Organisasi, yaitu: Karakteristik Organisasi, Karakteristik Lingkungan, Karakteristik Pekerja, Kebijakan dan praktek Manajemen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memfasilitasi hubungan urusan Pemerintah Jawa Barat ke Pemerintah Pusat guna membantu memajukan pembangunan Daerah Jawa Barat.

METODE

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif ditujukan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai suatu variabel.

Menurut Sugiyono (2017: 7): ”Penelitian kualitatif adalah metode penelitian baru yang dinamakan dengan metode Postpositivistik. Metode ini sering digunakan sebagai metode artistik karena proses penelitiannya lebih bersifat seni dan disebut metode interpretive karena data hasil penelitian yang didapat lebih bersifat interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan”.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berada di Jakarta Pusat meliputi seluruh pegawai. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017: 224) pengumpulan

data dibagi menjadi tiga yaitu:” Data Primer, merupakan data langsung yang diberikan pada peneliti, data observasi, merupakan data yang didapatkan melalui kegiatan untuk mengumpulkan data yang kompleks, studi pustaka, digunakan untuk mengumpulkan data yang berasal dari jurnal maupun sumber-sumber referensi lain yang sesuai dengan subjek penelitian, dan dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari dokumen hasil kegiatan”. Teknik analisis data menggunakan melakukan triangulasi pada seluruh data yang ada dengan cara mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah, Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas Pemerintah Jawa Barat untuk mendukung kelancaran hubungan dan kerja sama, membina masyarakat Jawa Barat di Wilayah ibukota termasuk sekitarnya, menyelenggarakan promosi daerah, mengelola Anjungan Jawa Barat di Taman Mini Indonesia Indah dan aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ada di lingkungan pemerintah pusat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki sejumlah tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No.81 Tahun 2016 pada Bab II yaitu badan penghubung mempunyai tugas pokok dalam

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi bidang penghubung pemerintahan, meliputi hubungan antar lembaga, promosi, dan informasi serta keprotokolan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Serta adapun fungsi dari Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Penghubung pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
- b. Penyelenggaraan tugas dukungan teknis bidang perencanaan
- c. Penyelenggaraan administrasi Badan
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Badan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Berdasarkan isi dari peraturan tersebut maka dapat dipahami bahwasanya, Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat berfungsi sebagai pelaksana fasilitas hubungan kerja Pemerintah Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang sifatnya bertugas dalam memfasilitasi urusan administrasi yang non teknis dalam usaha pembangunan Daerah.

Struktur Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No.81 Tahun 2016 terdiri dari: Kepala Badan, Subbidang Tata Usaha, Subbidang Hubungan Antar Lembaga, Subbidang Promosi dan Informasi, dan Subbidang Keprotokolan.

Karakteristik Lingkungan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat

Lingkungan pemerintahan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan sangat baik, hal ini berdasarkan tinjauan peneliti dari data yang dikumpulkan selama pelaksanaan Praktek Lapangan (PL) III. Lokasi kantor yang berada di pusat pemerintahan (5 menit menuju gedung Kementerian Dalam Negeri, Gambir dan istana negara) memberikan suatu akses yang mudah bagi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merespon dengan cepat segala kebutuhan pemerintah daerah terkait lancarnya komunikasi dan kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah pusat. Selain itu, ada peran penting yang terjalin antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan ketatapemerintahan yaitu salah satunya sebagai salah satu provinsi penunjang ibukota. Hal ini memberikan dampak baik bagi keduanya.

Karakteristik Pekerja Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat

Jumlah pekerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari 52 orang dengan rincian 24 ASN, 8 Calon ASN, dan 20 pegawai kontrak. Untuk jumlah pekerja tersebut tergolong dikategorikan cukup, mengingat tugas yang dimiliki oleh Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbilang situasional dan memadai dalam pelaksanaan keprotokolan serta untuk memberikan fasilitas pelayanan terhadap seluruh aparat pemerintah daerah Jawa Barat yang sedang melakukan kunjungan kerja ke daerah lingkungan pemerintah pusat (Jabodetabek), hal itu dikarenakan

kelebihan letak geografis Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta sehingga mobilisasi yang dilakukan pun tidak memakan waktu yang banyak sehingga kerap kali badan penghubung hanya menjadi tempat singgah. Sebagian besar pekerja atau pegawai yang ada adalah berasal dari daerah ASN Pemprov Jawa Barat yang dimutasikan oleh pemerintah daerah untuk menduduki posisi-posisi di Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk pegawai honorer berasal dari sekitaran daerah Jabodetaek. Secara karakteristik pekerja Badan penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat sama seperti karakteristik pekerja di kantoryang basis tugasnya

adalah penyelenggaraan pelayanan kepada pemerintah dan masyarakat, yang memberikan pelayanan dan pengayoman pada masyarakat Jawa Barat sehingga tetap mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat daerah Jawa Barat, tapi belakangan karena adanya fenomena pandemi Covid-19 menyebabkan pegawai diharuskan menyesuaikan dengan peraturan protokol kesehatan mengenai pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena kantor Badan Penghubung itu sendiri yang terletak di lingkungan Jakarta.

Kebijakan dan praktek Manajemen Penetapan Tujuan Srategis

Tabel 1 Data Target Kinerja Sasaran

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Tata Budaya Adat Istiadat dan Kesenian sunda	Menguatkan Tata Budaya Adat Istiadat dan Kesenian serta menjaga kelestarian adat dan budaya sunda	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya sunda di Jakarta	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan
			Jumlah pengunjung pada pelaksanaan kegiatan promosi dan pameran Seni budaya sunda yang dilaksanakan Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat di Jabodetabek	22000 pengunjung	24000 pengunjung	26000 pengunjung	28000 pengunjung	30000 pengunjung
			Jumlah kunjungan masyarakat pada anjungan Jawa Barat sebagai objek pameran di Taman Mini Indonesia Indah (TMII)	11000 pengunjung	12000 pengunjung	13000 pengunjung	14000 pengunjung	15000 pengunjung
2	Penyajian informasi yang terintegrasi dengan website	Meningkatkan kualitas data dan informasi umum mengenai Jawa Barat melalui website	Jumlah Pengakses Data dan Informasi pada Website Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat	1000/hari	1200/hari	1300/hari	1400/hari	1500/hari

Sumber : badan-penghubung.jabarprov.go.id

Dalam tabel di atas, yang menjadi tujuan dan sasaran serta prioritas dari Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat terlihat berfokus kepada hal-hal yang bersifat umum dan bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat baik melalui website maupun pengenalan budaya-budaya sunda khususnya di lingkungan Jabodetabek, seharusnya tujuan dan sasaran juga mencakup strategi terbaik untuk melancarkan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah lain.

Pencarian dan Pemanfaatan Sumber Daya

Dalam Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki sumber dana yaitu APBD dan APBN yang menjadi sumber utama pengelolaan segala urusan dan kegiatan Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat. Selain sumber keuangan dari APBN dan APBD sumber lain juga berasal dari sumber daya manusianya yaitu Dalam struktur organisasi Pemerintah Jawa Barat, Badan Penghubung berada pada jenjang eselonering IIIa. Satuan kerja ini terdiri dari 4 (empat) jabatan eselon IVa, yaitu: Kepala Badan, Sub Bagian Tata Usaha, Subbidang Hubungan Antar Lembaga, Subbidang Promosi dan Informasi, Subbidang Keprotokolan. Sumber daya Asset dan Modal terdiri dari : Kantor di Jl. Pembangunan II No.3-5, RT.9/RW.2 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat 10130. Mess ini terdiri dari 3 lantai dan memiliki 12 kamar untuk penginapan dan 3 ruang pertemuan dengan segala fasilitas penunjang lainnya. Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat juga mengelola Anjungan Jawa Barat TMII.

Prestasi yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat

Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tugas yang banyak berkaitan dengan pengelolaan dan promosi daerah, adapun beberapa pencapaian diantaranya Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat 5 besar terbaik di antara perangkat daerah se-Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 dalam penyelenggaraan pelayanan, prestasi lainnya dilihat dari sudah

banyaknya aset daerah yang tersertifikasi, memberi bantuan rumah singgah, transportasi, dan saat ini sedang berusaha untuk mengembangkan dengan mengenalkan budaya sunda di lingkungan Jabodetabek baik melalui kurikulum di bangku sekolah maupun sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan animo masyarakat terhadap kebudayaan sunda Jawa Barat, selain itu Badan Penghubung Jawa Barat juga berperan aktif dalam usaha melancarkan hubungan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan swasta bahkan luar negeri terkait penanaman modal dan investasi untuk daerah Jawa Barat.

Proses Komunikasi Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat

Dalam kinerjanya untuk memfasilitasi segala urusan pemerintah Jawa Barat dengan pemerintah pusat, menurut penuturan Kasi Nilai Budaya, selama menjalin hubungan kerjasama antarpemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah Pusat, Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat menerima bentuk komunikasi yang sifatnya formal melalui kantor ataupun bersifat pribadi yang langsung berhubungan dengan aparat Badan Penghubung Pemerintah

Jawa Barat. Komunikasi yang dilakukan juga dapat melalui email resmi maupun WhatsApp yang langsung berhubungan dengan pegawai yang bersangkutan. Dalam penuturannya narasumber juga mengatakan, bahwa Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat sangat fleksibel, dalam membantu mempercepat proses administrasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi ketika sedang menjalin hubungan kerjasama dengan instansi atau investor. Hal ini tentu menjadi kemudahan bagi daerah dalam mempercepat segala proses komunikasi dengan pihak luar yang diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah daerah.

Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Setiap pimpinansatuan unit kerja dilingkungan

Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat wajib melaksanakan Sistem pengendalian internal. Dari Peraturan Gubernur tersebut dapat dipahami bahwa Badan Penghubung Jawa Barat dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi Kepala Subbagian, Kepala Subbidang yang wajib melakukan koordinasi antar satu sama lain, dengan begitu kepemimpinan dan pengambilan keputusan di dalam lingkungan Badan Penghubung Jawa Barat berjalan dengan budaya musyawarah yang baik.

Adaptasi dan Inovasi Organisasi

Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat merupakan badan daerah

yang kantornya terletak di luar daerah, dengan budaya dan karakteristik daerah yang berbeda tentu Badan Penghubung Jawa Barat mengalami banyak reduksi budaya. Secara alamiah kantor yang terletak di dekat ibu kota tentu berbeda kondisinya dengan kantor daerah yang berada di lingkungan pemerintah daerah, suasanakompetisi dalam menjalankan pemerintahan daerah yang baik terasa lebih kompetitif. Dalam melakukan inovasi Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat berdasarkan pengamatan dan data yang ditemukan oleh peneliti terlihat bahwa sebagian besar kegiatan yang dilakukan ide dan gagasannya berasal dari internal Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat.

KESIMPULAN

Efektivitas Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat dalam membantu memfasilitasi segala urusan pemerintah Jawa Barat dengan pemerintah pusat dapat dikategorikan sangat efektif. Keefektifan tersebut dilihat dari input tugas yang ada seluruhnya dapat diproses dengan cepat oleh Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat. Yang menjadi masalah ialah input tugas yang masuk tersebut sebagian besar hanya berasal dari urusan-urusan umum sedangkan untuk usaha mempercepat pembangunan bangsa belum terlihat adanya perkembangan yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat. (1986). Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan . Yogyakarta: Gajah Mada University press.
- Kushandajani2018Makna Otonomi Daerah di Wiayah Laut Bagi Masyarakat Pesisir-

cet2semarangFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Siagian, S. P. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara.
Steers, R. M. (2005). Manajemen Organisasi Terjemahan Magdalena Jamin. Jakarta: Erlangga.
Sugiyono, P. D. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Pemerintah Nomor.18 Perangkat Daerah . (2016). Retrieved 7 8,2020,fromBkn.go.id:<https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2016/10/PP-NOMOR-18-TAHUN-2016-PERANGKAT-DAERAH.pdf>
Peraturan Pemerintah Nomor.18 Perangkat Daerah . (2016). Retrieved 7 8, 2020,fromBkn.go.id:<https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2016/10/PP-NOMOR-18-TAHUN-2016-PERANGKAT-DAERAH.pdf>
Badan-penghubung.jabarprov.go.id